

Gamawan Masih Tak Percaya Proyek e-KTP Dikorupsi

Selasa, 10 Oktober 2017 | 7:32

<http://sp.beritasatu.com/home/gamawan-masih-tak-percaya-proyek-e-ktp-dikorupsi/120808>



Gamawan Fauzi

Berita Terkait

- Setya Novanto Tak Penuhi Panggilan Sidang Kasus E-KTP
- KPK Tak Ambil Pusing dengan Ancaman Fredrich Yunadi
- Ketua KPK Pantau Praperadilan Novanto
- Wakil Ketua KPK Sebut Surat Setjen DPR Tak Berpengaruh di Pemeriksaan
- Sakit, Setnov Dipastikan Tak Hadiri Sidang Praperadilan

[JAKARTA] Mantan Mendagri Gamawan Fauzi masih tidak percaya proyek pengadaan e-KTP yang diadakan pada masa kepemimpinannya sebagai mendagri, dikorupsi. Pasalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan pendampingan tidak menemukan adanya penggelembungan harga (mark-up) sewaktu dirinya meminta audit.

Gamawan menuturkan, BPKP melakukan dua kali audit selama proses pengadaan e-KTP, yakni mengenai harga perkiraan sementara (HPS) dan pada saat proses lelang. Hasilnya, tidak ditemukan adanya mark-up.

Selain BPKP, kata Gamawan, BPK bahkan melakukan post audit sebanyak tiga kali dan menyatakan proyek senilai Rp 5,9 triliun bebas KKN. Namun, dalam perkembangan di KPK, BPKP malah menyatakan ada kerugian negara Rp 2,3 triliun.

"Itu yang saya sesalkan sekarang. Kenapa dulu tidak ada laporan mark up? Padahal dua kali diaudit BPKP," kata Gamawan saat dihadirkan Jaksa KPK bersaksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/10).

Gamawan bahkan meyakini tidak ada persengkokolan dalam pelaksanaan proyek e-KTP yang belakangan dikerjakan oleh tiga konsorsium. Pasalnya, gugatan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) justru menyatakan tidak adanya kongkalikong dalam pemenangan tender hingga berkekuatan hukum tetap.

Dia menyebut, jika pihaknya menemukan adanya indikasi korupsi pada saat pelaksanaan proyek e-KTP tahun 2010-2011, maka dirinya selaku Mendagri bakal menghentikan proyek itu sejak awal.

Gamawan tidak menyangkal dirinya mengenal dua mantan bawahannya, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP, yang telah dipidana lebih dulu dalam perkara tersebut. Namun Gamawan mengaku tidak mengurus proses penganggaran proyek e-KTP.

Proses anggaran, kata Gamawan, diurus oleh sekjen dan dirjen sesuai dengan Pasal 104 Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dia tidak pernah membahas proses penganggaran kendati dalam dakwaan KPK, terdapat banyak aliran dana yang mengalir ke politisi di DPR dalam tahap penganggaran proyek e-KTP.

"Saya tidak membahas anggaran selama jadi menteri," ujarnya dihadapan majelis yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar.

Gamawan membenarkan pertanyaan majelis hakim yang menyebut dirinya pernah diajak Irman dan Sugiharto berlibur ke Singapura. Hal itu dilakukannya usai mengunjungi Batam terkait peresmian perekamaan e-KTP.

Namun Gamawan membantah jika liburannya ke Singapura berasal dari uang e-KTP. Bahkan, dia menyebut menggunakan uang sendiri selama berlibur di Singapura ditemani dua bawahannya yang kini menjadi terpidana.

Sekalipun tidak habis pikir proyek e-KTP dikorupsi, Gamawan meyakini, proyek e-KTP tidak akan pernah tuntas karena harus dilanjutkan setiap tahun. Pasalnya, perekaman data penduduk masih karut-marut.

"Tiap hari kan ada yang ulang tahun usia 17 tahun. Maka proyek ini tidak akan pernah selesai sampai kapan pun," katanya.

Dengan demikian, Kemdagri setiap tahunnya harus menyiapkan anggaran pencetakan e-KTP dan membereskan proses rekam data yang selalu menjadi hambatan sejak 2011. [E-11]